

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pemantauan Harga dan Ketersediaan Stok Kebutuhan barang pokok dan penting di Kutai Barat cenderung stabil dan stok kebutuhan pokok tercukupi. Namun pada minggu ke 4 Bulan Februari terjadi kenaikan harga beras walaupun masih dalam batas aman dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Selain beras, yang juga mengalami kenaikan adalah gula pasir dan minyak goreng. Sampai Akhir bulan Maret, beras masih mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Sampai awal bulan April, bisa dilaporkan stok bahan pokok dan bahan pangan aman menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2024.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kecendrungan terjadi peningkatan inflasi menjelang Hari Raya Keagamaan di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
2. Sebagai daerah yang bukan merupakan sentra produksi, Kabupaten Kutai Barat sangat bergantung kepada pasokan dari luar daerah seperti Samarinda, untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, gula, bawang merah, bawang putih, cabe dan daging ayam ras. Beberapa komoditi tersebut masih disuplay atau dipasok dari daerah lain
3. Harga Cabe juga mengalami kenaikan signifikan dalam sebulan terakhir, hal tersebut berimbas kepada pengusaha warung/catering. Sedangkan untuk masyarakat tidak terlalu berdampak karena sudah banyak masyarakat yang menanam tanaman cabe di pekarangan rumahnya
4. Akses jalan yang masih rusak dan parah di wilayah Kecamatan Bongan dan Perbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara, sangat mempengaruhi kelancaran distribusi, terjadinya kerusakan pada banyak titik menyebabkan pergerakan harga menjadi naik karena biaya angkut yang lebih besar. Kerusakan disebabkan banyaknya kendaraan pengangkut kelapa sawit dan CPO yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Permasalahan jalan ini sudah seringkali dilaporkan ke Pihak Provinsi maupun Pusat. Pemerintah Kabupaten tidak bisa menganggarkan perbaikan karena status jalan Negara.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. TPID Kabupaten Kutai Barat mengikuti Capacity Building Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja TPID tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Provinsi Kaltim dan Bank Indonesia di Hotel Pullman Jakarta Pusat Pada tanggal 30 sd 31 Januari 2023
2. TPID Kabupaten Kutai Barat mengikuti Forum Penulisan Laporan Evaluasi Kinerja TPID se Kalimantan Timur di Balikpapan pada tanggal 19 sd 20 Februari 2024. Dan pada moment ini semua Laporan Evaluasi Kinerja TPID dalam bentuk dokumen Self Assessment dan One Page Summary/Program Unggulan dikirimkan ke Email Panitia/Penilai TPID di Pusat.
3. Pada Awal Bulan Maret selama sebulan akan dilaksanakan Pemantauan Harga bahan

pokok dan barang penting lainnya di 16 Kecamatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kutai Barat sebagai Sekretariat TPID Kutai Barat. Hal tersebut dilaksanakan sebagai tahap awal sebagai dasar melaksanakan High Level Meeting (HLM) menjelang Hari Besar Keagamaan dan sidak pasar.

4. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kutai Barat akan melaksanakan Pasar Murah di 7 Lokasi (7 kecamatan) Menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Paskah) yang dimulai tanggal 14 Maret 2024
5. Pengawasan LPG 3 kg dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian di 16 Kecamatan dimulai Bulan Februari 2024
6. Pengawasan distribusi solar bersubsidi dilaksanakan di 16 Kecamatan wilayah Kabupaten Kutai Barat yang terdapat APMS/SPBU di awal Februari 2024
7. Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Gerakan Pangan Murah di 16 Kecamatan yang dimulai pada tanggal 1 Maret 2024. Dengan menggunakan metode subsidi ongkos angkut dengan dana APBD Murni.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya Rapat Koordinasi Kelanjutan dari pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan stok kebutuhan pokok di 4 pasar di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
2. Perlu adanya sosialisasi dan rapat koordinasi dengan OPD teknis terkait dalam hal penyusunan laporan triwulan TPID Kabupaten Kutai Barat.
3. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens dengan pihak kecamatan terkait dalam hal pemantauan stok dan harga barang menjelang Hari Raya Idul Fitri

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pada bulan Maret tahun 2024 telah dilaksanakan Pemantauan Ketersediaan stok dan harga bahan pokok di 16 Kecamatan dan Pelaksanaan Pasar Murah di 7 Lokasi menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Paskah
2. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Bulog Samarinda dalam rangka Kerjasama Subsidi Ongkos Angkut dalam hal Pengadaan Bahan pangan yang akan dijual dalam Gerakan Pangan Murah
3. Penguatan koordinasi khususnya terkait pelaporan kegiatan TPID Kabupaten Kutai Barat dalam rangka penyampaian laporan kinerja tahunan kepada TPIP.
4. Melakukan pengawasan distribusi dan harga LPG 3 Kg dan barang bersubsidi lainnya untuk mengantisipasi kelangkaan barang bersubsidi. PIC dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Disdagkop dan UKM